

Siaran Pers

untuk diterbitkan segera

Kadin Indonesia Bersama OIKN, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Investasi Dorong Partisipasi Swasta di Pembangunan IKN

Jakarta, 1 Desember 2023 - Setelah sukses digelar di kota Balikpapan dan Bali, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama Kementerian Keuangan dan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) hari ini kembali menggelar *Roadshow* 'Konsultasi Publik mengenai Peluang Penanaman Modal, Insentif Penanaman Modal, dan Kemudahan Berusaha di IKN', di Jakarta. Melalui kegiatan Konsultasi Publik dan sesi diskusi antar berbagai pemangku kepentingan, kegiatan ini berupaya mendorong investasi dan partisipasi sektor swasta dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kepala Badan Pengembangan Kawasan Properti Terpadu Kadin Indonesia, Budiarsa Sastrawinata, menegaskan komitmen Kadin Indonesia dalam mendorong pembangunan IKN sebagai salah satu program prioritas organisasi guna mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 yang tangguh, sejahtera, inklusif dan berkelanjutan.

"IKN memiliki aspirasi untuk menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Pelaksanaan *Roadshow* ini penting untuk mendorong dunia usaha mengenai peluang dan fasilitas investasi di IKN sekaligus mendapatkan umpan balik dari para pelaku usaha guna mengoptimalkan regulasi penanaman modal dan kemudahan berusaha di IKN," ungkap Budiarsa.

Salah satu kegiatan utama di dalam *roadshow* ini adalah sesi konsultasi publik. Sesi tersebut mempertemukan para pelaku usaha dengan para pemangku kepentingan antara lain Otorita IKN dan Kementerian Keuangan selaku regulator untuk mendorong terciptanya ekosistem investasi yang sehat di IKN.

Selain itu terdapat sejumlah sesi yang membahas topik-topik penting bagi sektor swasta antara lain Peluang dan Skema Investasi di Ibu Kota Nusantara, Fasilitas Kepabeanan Impor Barang di IKN dan Daerah Mitra, Kemudahan Insentif Perpajakan mengenai Cluster PPN dan PPnBM di Daerah Pengembangan IKN, dan Fasilitas *Tax Holiday* dalam berinvestasi di IKN.

Keberlangsungan pembangunan IKN telah dijamin oleh pemerintah dan dapat dijelaskan bahwa insentif di IKN merupakan yang paling menarik di Indonesia, dengan kepastian hukum. OIKN menjalankan Undang-Undang IKN dengan tekun, yang memberikan perlindungan kepada masyarakat yang ingin berkontribusi dan swasta yang berinvestasi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Siaran Pers

untuk diterbitkan segera

"Hal ini dibuktikan bahwa hingga saat ini, sudah ada 35 triliun rupiah komitmen investasi swasta yang diwujudkan dalam pembangunan di IKN, setara dengan besarnya APBN yang dialokasikan untuk pembangunan IKN. Jadi, IKN ini sudah dibangun bukan hanya dengan uang negara, namun juga uang masyarakat melalui investasi swasta yang nilainya setara," kata **Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otoritas Ibu Kota Nusantara, Agung Wicaksono**.

Mewakili Wakil Menteri Keuangan, **Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan, Yon Arsal**, mengatakan bahwa pemerintah selalu membuka pintu kolaborasi sebesar-besarnya dengan sektor swasta dalam keberhasilan pembangunan IKN. "Kementerian Keuangan berkomitmen untuk mendukung pendanaan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di IKN yang luasnya mencapai 6.600 hektar melalui APBN. Sementara, kawasan yang lebih besar akan dibangun dengan menggunakan skema pembiayaan kreatif, seperti *blended finance*," ujar Yon Arsal.

Senada, **Direktur Deregulasi Kementerian Investasi/BKPM, Dendy Apriandi**, mengungkapkan bahwa pembangunan IKN membutuhkan dukungan dari para pelaku usaha, khususnya dalam rangka pendanaan pembangunan. Oleh karena itu, investasi dari pelaku usaha menjadi bagian penting dari skema pembangunan IKN.

"Dukungan dari dunia usaha yang dikoordinasikan oleh Kadin Indonesia sangat dibutuhkan bagi IKN untuk tetap berjalan dan mencapai visi kota berkelanjutan yang dicita-citakan. IKN diharapkan mampu menjadi suar Indonesia bagi dunia internasional, bahwa bangsa ini adalah bangsa yang maju dan mengedepankan nilai-nilai inklusivitas, keberlanjutan dan berbasis teknologi dalam setiap pembangunannya," tutur Dendy.

Menurut data dari Sekretariat Presiden, sudah ada investor swasta yang hadir dalam pembangunan IKN. Investasi tersebut merupakan gabungan investasi dari konsorsium yang terdiri atas sepuluh perusahaan besar, antara lain, Agung Sedayu Group, Salim Group, Sinarmas, Pulauintan, Adaro Group, Barito Pacific, Mulia Group, Astra Group, Kawan Lama Group, dan Alfamart group.

Dari sisi infrastruktur, berdasarkan data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perkembangan konstruksi infrastruktur dasar IKN Tahap 1 telah mencapai 38,1% per Agustus 2023 dan seluruh kegiatan masih berjalan sesuai dengan jadwal pelaksanaan. Beberapa infrastruktur dasar tersebut antara lain Jalan Tol Akses IKN Tahap 1, Istana Negara, Kantor Presiden, dan Bendungan Sepaku Semoi. Selain itu, untuk tahap 2, mencakup proyek-proyek yang kontraknya dimulai pada April sampai Mei 2023, seperti Bangunan Kementerian Koordinator dan Rumah Rusun ASN (Aparatur Sipil Negara) IKN juga telah mulai dikerjakan.

Siaran Pers

untuk diterbitkan segera

Tentang Kadin Indonesia

Berdiri pada tahun 1968 dan ditetapkan berdasarkan hukum pada 1987, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia merupakan organisasi payung bagi seluruh kamar dagang dan serikat bisnis Indonesia, termasuk kamar dagang yang berasal dari luar negeri di Indonesia. Kadin Indonesia bertindak selaku suara sektor swasta dan menjalin hubungan erat dengan pejabat pemerintahan. Misi Kadin Indonesia adalah untuk mendukung perkembangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara vital, berkelanjutan, dan adil. Jaringan Kadin Indonesia yang mencakup 34 Kadin Provinsi dan 544 cabang distrik mewakili suara seluruh serikat bisnis meliputi semua sektor relevan dari ekonomi Indonesia. Bermitra dengan lembaga pemerintahan kunci, Kadin Indonesia merupakan mitra aktif dalam reformasi bisnis dan ekonomi. Kadin Indonesia adalah titik kontak pertama bagi perusahaan asing dan membuka pintu menuju sektor swasta di Indonesia yang dinamis.

Untuk informasi lanjutan:

Steven Polhaupesy

Humas Sekretariat Kadin Indonesia

steven.yohanes@kadin.id

Tentang Otorita Ibu Kota Nusantara

Nusantara adalah Ibu Kota Negara Indonesia di masa depan, yang ditetapkan dan diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Terletak di pesisir timur Pulau Kalimantan. Luas wilayah Nusantara hampir empat kali Jakarta, yaitu kurang lebih 256.142 hektar dan wilayah laut seluas 68.189 hektar. Nusantara akan mengubah orientasi pembangunan menjadi Indonesia-sentris, dan berfungsi untuk mempercepat transformasi ekonomi negara. Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) ialah otoritas yang mengelola dan mengatur Nusantara. OIKN merupakan lembaga setingkat kementerian yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia, bekerja langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. OIKN bertugas sebagai pendukung persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara ke Nusantara.

Untuk informasi lanjutan:

Biro Sumber Daya Manusia dan Hubungan Masyarakat

Nomor Telepon : (+62) 811-8115-8888

Website : ikn.go.id

Instagram : [instagram.com/ikn_id](https://www.instagram.com/ikn_id)

Facebook : [facebook.com/iknindonesia1](https://www.facebook.com/iknindonesia1)

Twitter : twitter.com/ikn_id

Youtube : [IKN Indonesia](https://www.youtube.com/IKN Indonesia)

#KotaDuniauntukSemua

#Nusantara

#IbuKotaNegara



Siaran Pers
untuk diterbitkan segera